

Analisis Kebijakan Pada Peraturan Menteri Pendidikan No 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal

Sahata Sabarian Naibaho^{1*}, Salma Shafira^{2*}, Sri Wahyuni^{3*}

¹Departemen Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Dikirim pada tanggal 31 Juli 2024

Direvisi pada tanggal 31 Juli 2024

Diterima pada tanggal 01 Agustus 2024

Tersedia online pada tanggal 01 Agustus 2024

Kata kunci:

Permendikbud No 20 Tahun 2018, Pendidikan didasari oleh berbagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan karakter, Analisis.



This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Laboratory of Educational Administration Departemen Universitas Negeri Padang

*Penulis Korespondensi:

Nama Penulis:

¹Sahata Sabarian Naibaho

Email:

¹sabatriansahata@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah salah satu sektor yang sangat penting dalam pembangunan sebuah negara. Demi memastikan bahwa sistem pendidikan terlaksana dengan baik, pemerintah perlu membuat kebijakan-kebijakan yang relevan dan efektif. Salah satu kebijakan yang penting dalam bidang pendidikan adalah Peraturan Menteri Pendidikan No. 20 Tahun 2018. Peraturan tersebut merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan agar mengatur beragam aspek berhubungan dengan pendidikan di Indonesia. Kebijakan ini menentukan standarstandar yang harus dipenuhi oleh sekolah dan institusi pendidikan lainnya, serta memberikan pedoman dalam pelaksanaan aktivitas pendidikan. Analisis kebijakan pada Peraturan Menteri Pendidikan No. 20 Tahun 2018 sangat penting dilaksanakan demi mengevaluasi dampak dan efektivitas kebijakan tersebut. Dalam hal ini, akan dilaksanakan tinjauan mendalam terhadap berbagai aspek kebijakan, seperti tujuan kebijakan, landasan hukum, proses perumusan kebijakan, dan implementasi kebijakan di lapangan. Dengan melaksanakan analisis kebijakan, dapat diketahui apakah Peraturan Menteri Pendidikan No. 20 Tahun 2018 telah berhasil mencapai tujuan yang diinginkan atau belum. Selain itu, analisis kebijakan juga dapat memberikan masukan demi perbaikan kebijakan dan pengambilan keputusan yang lebih baik di masa yang datang.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Kebijakan dan Pentingnya Kebijakan Pengertian Kebijakan

Menurut Carl J. Federick (dalam Leo Agustino, 2008 : 7) menyebutkan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan (kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Menurut Noeng Muhadjir menyatakan bahwa kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni; (1) tingkat hidup masyarakat meningkat, (2) terjadi keadilan : By the law, social justice, dan peluang prestasi dan kreasi pribadi, (3) diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan (4)terjaminnya pengembangan berkelanjutan. Menurut Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) menyebutkan ada beberapa pedoman sebagai berikut: a) Kebijakan mesti dibedakan dari keputusan, b) Sebenarnya kebijakan tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi, c) Kebijakan meliputi perilaku dan harapan-harapan, d) Kebijakan meliputi tidak adanya tindakan ataupun adanya tindakan, e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang hendak dicapai, f) Setiap kebijakan mempunyai tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit, g) Kebijakan timbul dari sebuah proses yang berlangsung sepanjang waktu, h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi, i) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah, dan j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Pentingnya Kebijakan

Pentingnya kebijakan adalah kebijakan harus bisa menyelesaikan masalah yang ada dengan tuntas, bukan hanya menimbulkan masalah baru. Kebijakan yang efektif harus berorientasi pada tujuan yang jelas dan dapat dicapai dengan cara yang efektif. Partisipasi Publik Kebijakan dalam sistem demokrasi harus menggambarkan partisipasi publik dan kesejahteraan sosial. Kebijakan mesti menjadi solusi yang berdasarkan hukum dan mempunyai kewenangan masyarakat untuk mematuhi. Kualitas Kebijakan harus berbasis bukti dan unggul demi meningkatkan kualitas kebijakan publik. Kebijakan wajib menjadi bagian yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kebijakan yang baik harus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi, budaya, sosial, dan politik. Perubahan jabatan dari struktural ke fungsional dapat menambah profesionalisme analisis kebijakan serta memungkinkan mereka untuk lebih berkontribusi pada tujuan organisasi. Dengan demikian, kebijakan yang baik wajib berorientasi pada tujuan yang jelas, partisipasi publik, kualitas yang unggul, pengembangan masyarakat, dan transformasi jabatan yang efektif.

Langkah-Langkah Membuat Kebijakan

1. Penyusunan agenda, suatu fase dan proses yang amat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses tersebut, ada ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan agenda publik penting diperhitungkan.
2. Formulasi kebijakan, permasalahan yang telah masuk dalam agenda kebijakan selanjutnya diperbincangkan oleh para pembuat kebijakan. Permasalahan tadi didefinisikan kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari beragam alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.
3. Legimitasi kebijakan, memberikan otorisasi terhadap proses dasar pemerintahan. Apabila tindakan legitimitasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.
4. Evaluasi, kegiatan atau aktivitas yang melibatkan estimasi atau penilaian kebijakan yang meliputi substansi, implementasi serta dampak.

Informasi Kebijakan

Apa itu Permendikbud No. 20 Tahun 2018?

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Karakter (Permendikbud No. 20/2018) merupakan kebijakan yang mengatur tentang pengembangan karakter peserta didik melalui pendidikan di sekolah. Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan peserta didik yang berkarakter Pancasila yang berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan berkewarganegaraan baik.

Untuk siapa ditujukan?

Permendikbud No. 20/2018 dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Kebijakan ini ditujukan untuk peserta didik, pendidik, kepala sekolah, dan penyelenggara pendidikan.

Dimana berlakunya Permendikbud?

Permendikbud No. 20/2018 berlaku di seluruh wilayah Indonesia dan diterapkan di semua satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta, yang menyelenggarakan pendidikan formal mulai dari tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Mengapa Permendikbud No. 20 Tahun 2018 dibuat?

Permendikbud No. 20/2018 dibuat karena generasi muda Indonesia perlu dibekali dengan karakter yang kuat untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu peserta didik mengembangkan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan menjadi pribadi yang berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan berkewarganegaraan baik.

Bagaimana Permendikbud No. 20 Tahun 2018 mengatur penguatan karakter?

Permendikbud No. 20/2018 mengatur berbagai hal terkait dengan penguatan karakter peserta didik, termasuk:

1. Nilai-nilai karakter Permendikbud No. 20/2018 mengidentifikasi 5 nilai karakter utama yang harus dikembangkan oleh peserta didik, yaitu: Religius, Nasionalisme, Integritas, Kemandirian, Gotong royong.
2. Penanaman nilai-nilai karakter: Nilai-nilai karakter ditanamkan melalui berbagai kegiatan pembelajaran, baik intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler.
3. Penilaian karakter: Penilaian karakter dilakukan secara berkala untuk memantau perkembangan karakter peserta didik.
4. Pembentukan budaya sekolah: Budaya sekolah yang mendukung penguatan karakter harus dibentuk dan dipelihara.

Kapan berlakunya?

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2018.

Perilaku Inovatif

Perilaku inovatif dalam analisis kebijakan merupakan pendekatan yang mendorong kreativitas, proaktifitas, dan eksperimen untuk menciptakan solusi kebijakan yang lebih efektif dan berdampak positif. Dalam konteks ini, perilaku inovatif melibatkan penggunaan teknologi dan metode analisis terbaru, seperti big data analytics, machine learning, dan artificial intelligence, untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah kebijakan dan potensi dampak dari berbagai pilihan kebijakan yang tersedia. Salah satu aspek utama dari perilaku inovatif dalam analisis kebijakan adalah kemampuan untuk berpikir di luar kotak dan menemukan pendekatan yang baru dan tidak konvensional untuk memecahkan masalah. Hal ini melibatkan eksplorasi ide-ide baru, penggabungan pendekatan lintas disiplin, dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendapatkan sudut pandang yang beragam. Dengan demikian, perilaku inovatif dapat membantu dalam mengidentifikasi solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan. Selain itu, perilaku inovatif juga mencakup sikap proaktif dalam menghadapi tantangan dan peluang yang muncul dalam proses analisis kebijakan. Hal ini melibatkan kemampuan untuk merespons perubahan dengan cepat, melakukan evaluasi yang berkelanjutan terhadap kebijakan yang ada, dan mengidentifikasi peluang untuk perbaikan atau inovasi. Dengan demikian, perilaku inovatif dapat membantu dalam menciptakan kebijakan yang responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terus berubah.

Hubungan antar Variabel

Hubungan antar variabel dalam analisis kebijakan merupakan aspek kunci dalam memahami kompleksitas dan dampak dari kebijakan yang diusulkan atau diterapkan. Variabel-variabel ini dapat mencakup faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, lingkungan, dan budaya yang saling terkait dan saling memengaruhi. Misalnya, dalam konteks kebijakan lingkungan, hubungan antar variabel dapat mencakup interaksi antara tingkat polusi udara, kualitas air, kesehatan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi.

Salah satu hubungan antar variabel yang penting dalam analisis kebijakan adalah hubungan sebab-akibat. Dalam konteks kebijakan publik, variabel-variabel seperti tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan akses terhadap pendidikan dapat saling memengaruhi dan berpotensi menciptakan efek domino yang kompleks. Misalnya, peningkatan akses terhadap pendidikan dapat berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, hubungan antar variabel juga dapat mencakup faktor-faktor mediasi dan moderasi. Misalnya, dalam analisis kebijakan kesehatan, variabel

seperti gaya hidup, akses terhadap layanan kesehatan, dan faktor genetik dapat saling memoderasi pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan masyarakat. Begitu pula dengan faktor mediasi, di mana variabel seperti tingkat pendapatan dapat menjadi mediator antara kebijakan redistribusi pendapatan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Pada artikel ini, penelitian menggunakan metode studi literatur dengan cara menggumpulkan literature (bahan-bahan materi) yang bersumber dari berbagai macam jurnal. Beragam bahan bacaan jurnal tersebut dikumpulkan dan dibuatlah artikel ini dengan menggabungkan berbagai macam materi yang ada berhubungan dengan analisis kebijakan pada peraturan menteri pendidikan No. 20 Tahun 2018. Artikel ini disusun karena ingin mengetahui tentang apa itu pendidikan karakter. Bentuk telaah yang dilakukan penulis ialah dengan membandingkan hasil tiap dari jurnal dan didukung dengan argumen buku untuk dapat menemukan keterkaitan antar satu sama lain sehingga menghasilkan suatu kebaruan dari penulis.

3. HASIL dan PEMBAHASAN

Perencanaan

Perencanaan dalam Permendikbud no 20 tahun 2018 mencakup beberapa hal, antara lain:

1. Perencanaan Pembelajaran. Satuan pendidikan diwajibkan untuk merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan. Pembelajaran harus disusun secara terstruktur, sistematis, dan terukur.
2. Perencanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Guru diwajibkan untuk merencanakan kegiatan PKB sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan profesi guru. Perencanaan PKB harus dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan program pengembangan sekolah.
3. Perencanaan Kurikulum Satuan pendidikan harus merencanakan kurikulum yang sesuai dengan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan. Kurikulum harus disusun secara terintegrasi dan menyeluruh.
4. Perencanaan Evaluasi Satuan pendidikan diwajibkan untuk merencanakan evaluasi pembelajaran yang mencakup evaluasi formatif, sumatif, dan remedial. Evaluasi harus dilakukan secara objektif dan berkelanjutan.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dalam Permendikbud no 20 tahun 2018 tentang standar proses pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah memiliki dampak yang signifikan dalam usaha meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan adanya kebijakan ini, ada beberapa aspek yang penting diimplementasikan oleh satuan pendidikan, meliputi perencanaan pembelajaran, pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB), kurikulum, dan evaluasi. Hal tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan sebagai acuan utama dalam proses pendidikan.

Perencanaan pembelajaran salah satu aspek penting dalam implementasi kebijakan ini. Setiap satuan pendidikan diwajibkan untuk menyusun rencana pembelajaran yang terstruktur, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dalam hal ini, guru dituntut untuk merencanakan pembelajaran yang mengacu pada Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan supaya dapat memastikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Dengan demikian, implementasi kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah. Selain itu, kebijakan ini juga menekankan pada pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) untuk para pendidik. Pendidik diharapkan untuk terus mengembangkan diri melalui kegiatan PKB yang relevan dengan tuntutan profesi guru dan perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan adanya kegiatan PKB yang terencana dan terukur, dapat diharapkan guru meningkatkan kompetensinya sehingga mampu memberikan pembelajaran yang lebih baik kepada siswa. Hal tersebut sejalan dengan usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan.

Selanjutnya kebijakan ini meliputi penyusunan kurikulum yang sesuai dengan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan. Kurikulum yang disusun harus mampu mencakup berbagai aspek pembelajaran

yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan peserta didik. Dengan hal ini, dapat diharapkan kurikulum dapat memberikan landasan yang kuat bagi proses pembelajaran yang efektif dan relevan sesuai dengan tuntutan zaman.

Kemudian kebijakan ini juga menekankan pada evaluasi sebagai bagian integral dari proses pendidikan. Satuan pendidikan diwajibkan untuk melaksanakan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Evaluasi bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi siswa sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan apabila diperlukan. Dengan adanya evaluasi yang terstruktur, diharapkan kualitas pendidikan di satuan pendidikan dapat terus ditingkatkan. Implementasi kebijakan dalam Permendikbud no 20 tahun 2018 mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Evaluasi Kebijakan

Dalam Permendikbud No 20 Tahun 2018 tentang standar proses pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah mempunyai peran yang sangat penting dalam memastikan efektivitas dan kesesuaian implementasi kebijakan tersebut. Evaluasi dilakukan dengan berkala untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut telah dijalankan, dampaknya terhadap proses pendidikan, serta untuk mengidentifikasi potensi perbaikan yang dapat dilakukan.

Salah satu aspek evaluasi kebijakan ini adalah evaluasi terhadap perencanaan pembelajaran. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana rencana pembelajaran yang disusun oleh satuan pendidikan telah sesuai dengan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan. Evaluasi ini juga mencakup penilaian terhadap keterlaksanaan rencana pembelajaran, penggunaan metode pembelajaran yang sesuai, serta pencapaian tujuan pembelajaran. Dengan demikian, evaluasi terhadap perencanaan pembelajaran dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas proses pembelajaran di satuan pendidikan.

Selain itu, evaluasi kebijakan juga mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan keprofesian berkelanjutan (PKB) bagi para pendidik. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana kegiatan PKB yang telah dilaksanakan oleh guru dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas pembelajaran. Evaluasi ini juga mencakup penilaian terhadap relevansi kegiatan PKB dengan tuntutan profesi guru dan perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, evaluasi terhadap kegiatan PKB dapat memberikan gambaran mengenai kontribusi kegiatan PKB terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan.

Selain itu, evaluasi kebijakan juga mencakup evaluasi terhadap penyusunan kurikulum. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana kurikulum yang disusun oleh satuan pendidikan mampu mencakup berbagai aspek pembelajaran yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan peserta didik. Evaluasi ini juga mencakup penilaian terhadap responsivitas kurikulum terhadap tuntutan zaman dan kebutuhan peserta didik. Dengan demikian, evaluasi terhadap penyusunan kurikulum dapat memberikan gambaran mengenai relevansi dan efektivitas kurikulum dalam mendukung proses pembelajaran.

Terakhir, evaluasi kebijakan juga mencakup evaluasi terhadap proses evaluasi yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana proses evaluasi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan mampu memberikan informasi yang akurat mengenai pencapaian kompetensi siswa serta efektivitas proses pembelajaran. Evaluasi ini juga mencakup penilaian terhadap penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran. Dengan demikian, evaluasi terhadap proses evaluasi dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas sistem evaluasi dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Analisis Kebijakan

Permendikbud No 20 tahun 2018 tentang standar proses pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah merupakan suatu proses yang penting untuk memahami implikasi, dampak, dan kesesuaian kebijakan tersebut dengan kondisi nyata di lapangan. Analisis kebijakan dilaksanakan untuk mengevaluasi secara mendalam berbagai aspek kebijakan tersebut, mulai dari tujuan, landasan hukum, konteks implementasi, hingga hasil yang diharapkan. Dengan melaksanakan analisis kebijakan yang

komprehensif, pemerintah dan stakeholder terkait dapat memahami lebih baik efektivitas kebijakan tersebut serta mengidentifikasi potensi perbaikan yang perlu dilakukan.

Salah satu aspek penting dalam analisis kebijakan yaitu pada tujuan kebijakan tersebut ialah untuk meningkatkan kualitas proses pendidikan di satuan pendidikan dasar dan menengah melalui penerapan standar proses pendidikan yang jelas dan terukur. Dalam melakukan analisis pada tujuan kebijakan, perlu dievaluasi sejauh mana tujuan tersebut relevan dengan tantangan dan kebutuhan pendidikan saat ini, serta apakah tujuan tersebut dapat memberikan arah yang jelas bagi pelaksanaan pendidikan di lapangan.

Selain itu, analisis kebijakan juga mencakup analisis terhadap landasan hukum kebijakan. Permendikbud No 20 tahun 2018 didasari oleh berbagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait pendidikan, seperti Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Guru, serta peraturan lainnya. Dalam melakukan analisis pada landasan hukum kebijakan, penting dievaluasi apakah kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, apakah implementasinya dapat dilaksanakan dengan efektif sesuai dengan ketentuan yang ada, serta apakah ada potensi konflik atau overlap dengan regulasi lain yang perlu diperhatikan.

Analisis kebijakan mencakup analisis pada konteks implementasi kebijakan. Konteks implementasi meliputi berbagai faktor seperti kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Dalam melakukan analisis ini, perlu dipertimbangkan sejauh mana kebijakan tersebut dapat diterima oleh masyarakat, apakah tersedia sumber daya yang cukup untuk mendukung implementasi kebijakan, serta bagaimana interaksi antara berbagai stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Selain itu, analisis kebijakan mencakup analisis terhadap hasil yang diharapkan dari implementasi kebijakan. Hasil yang diharapkan dari Permendikbud No 20 Tahun 2018 adalah peningkatan kualitas proses pendidikan, peningkatan kompetensi siswa, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan. Dalam melakukan analisis ini, perlu dievaluasi sejauh mana kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan-tujuannya, apakah ada indikator yang jelas untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan, serta bagaimana dampak kebijakan tersebut terhadap berbagai aspek pendidikan.

Pemerintah dan stakeholder terkait dapat memahami lebih baik implikasi dan dampak dari Permendikbud no 20 tahun 2018. Analisis kebijakan yang mendalam dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi potensi perbaikan yang perlu dilakukan, merumuskan strategi implementasi yang efektif, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pengembangan sistem pendidikan di Indonesia.

Rekomendasi

Langkah-langkah	Persoalan	Rekomendasi
-----------------	-----------	-------------

<p>Menyusun program-program pendidikan karakter yang terintegrasi dalam kurikulum sekolah</p>	<p>Kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pendidikan karakter di kalangan stakeholders pendidikan.</p>	<p>Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh pihak terkait mengenai pentingnya pendidikan karakter dalam meningkatkan kualitas pendidikan.</p>
<p>Melakukan pelatihan dan pembinaan kepada guru dan tenaga pendidik untuk menerapkan pendidikan karakter secara efektif.</p>	<p>Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran untuk melaksanakan program pendidikan karakter secara optimal.</p>	<p>Pemerintah perlu memberikan dukungan yang lebih besar dalam bentuk anggaran dan sumber daya manusia untuk mendukung implementasi kebijakan ini.</p>
<p>Membuat evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap implementasi kebijakan ini.</p>	<p>Tidak adanya standar evaluasi yang jelas untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan ini.</p>	<p>Menetapkan standar evaluasi yang jelas dan objektif untuk mengukur efektivitas program pendidikan karakter dan melakukan perbaikan jika diperlukan.</p>

4. KESIMPULAN

Pada umumnya Pedoman Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 merupakan karya penting untuk membentuk kepribadian generasi muda Indonesia melalui pembinaan yang baik. Pengaturan ini mengkoordinasikan nilai-nilai karakter utama seperti tegas, patriot, mandiri, partisipasi bersama, dan terhormat dalam latihan pembelajaran sehari-hari, latihan ekstrakurikuler, dan kehidupan sehari-hari di sekolah. Pelaksanaan kebijakan ini memerlukan tanggung jawab dan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pendidik, wali dan masyarakat setempat, agar nilai-nilai karakter dapat ditanamkan secara menyeluruh kepada siswa. Pendidik berperan sebagai model dan fasilitator, orang tua mendukung penerapan nilai-nilai di rumah, dan masyarakat berperan dalam menciptakan iklim yang berguna untuk memperkuat karakter.

Peraturan Menteri Pendidikan No. 20 Tahun 2018 adalah sebuah kebijakan yang mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Dalam analisis kebijakan ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa poin kunci yang menjadi fokus utama dari peraturan ini.

Pertama, kebijakan ini menekankan pentingnya peningkatan kualitas guru. Hal ini terlihat dalam upaya untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan profesional. Dengan mempunyai guru yang berkualitas, diharapkan hendaknya terjadi peningkatan dalam proses pembelajaran dan pencapaian hasil belajar siswa.

Kedua, peraturan ini juga menekankan pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Hal ini meliputi penyempurnaan kurikulum untuk memastikan bahwa materi pembelajaran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta relevan dengan tuntutan dunia kerja di masa depan.

Ketiga, kebijakan ini memberikan perhatian khusus pada penguatan pendidikan karakter. Dalam hal ini, peraturan tersebut menekankan pentingnya pembentukan karakter siswa melalui pendidikan nilai-nilai moral, etika, dan kepribadian yang baik. Dengan demikian, diharapkan siswa tidak hanya memiliki pengetahuan akademis yang baik, tetapi juga memiliki integritas dan tanggung jawab sosial yang tinggi.

Selain itu, peraturan ini juga menyoroti pentingnya peningkatan akses pendidikan bagi keseluruhan lapisan masyarakat. Upaya untuk mengurangi kesenjangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan serta antara kelompok sosial ekonomi yang berbeda menjadi salah satu fokus utama dari kebijakan ini.

Dalam keseluruhan analisis kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan No. 20 Tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini memiliki visi yang jelas untuk meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh. Dengan implementasi yang tepat dan dukungan yang kuat dari berbagai pihak terkait, diharapkan kebijakan ini dapat membawa perubahan positif dalam dunia pendidikan di Indonesia.

5. REFERENSI

- Abdul Wahab, Solichin. (2008). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Albertus, Doni Koesoema. (2015). *Pendidikan Karakter Utuh dan Menyeluruh*. Yogyakarta: Kanisius.
- Arif Bagas Wijaya. 17 Desember 2022. Pentingnya Kebijakan Unggul dan Berbasis Bukti Pada Pemerintahan. <https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktoratjenderal-ketenagalistrikan/pentingnya-kebijakan-unggul-dan-berbasis-buktipada-pemerintahan>
- Dalyono, B., & Lestariningsih, E. D. (2016). Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter Di Sekolah. *Bangun Rekaprima: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa, Sosial Dan Humaniora*.
- Dewayani, S. (2018). *Panduan Praktis Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Berbasis Kelas*. Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Freire, Paulo et al. (2003). *Menggugat Pendidikan: Fundamentalis, Konservatif, Liberal, dan Anarkis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hosnan, M. (2016). *Pendekatan Saintifik dan Konstektual dalam Pembelajaran Abad 21: Kunci Sukses Implementasi Kurikulum Abad 21*. Bogor: Ghalia Indonesia
- James P Lesterand J Stewart. (2000). *Public Policy: An Evaluation Approach (The University of California: Wadsworth Thomson Learning*.
- Judiani, S. (2010). Implementasi Pendidikan Karakter Di Sekolah Dasar Melalui Penguatan Pelaksanaan Kurikulum. *Jurnal Pendidikan Dan Nasional*, K.P. (2011). *Panduan pelaksanaan pendidikan karakter*. Jakarta: BPPPK Kemdiknas RI.

- Ki Hadjar Dewantara. (1962). *Karya Bagian I: Pendidikan*. Jogjakarta: Majelis Luhur Taman Siswa.
- La Madjid. (2020). *Pentingnya Kebijakan Publik Dalam Kehidupan Bernegara*. Artikel Kebijakan Public, <https://stiaalazka.ac.id/lamadjid/2020/01/27/pentingnyakebijakan-publik-dalam-kehidupan-bernegara/>
- Mardapi, Dj. dan Ghofur, A, (2004). *Pedoman Umum Pengembangan Penilaian; Kurikulum Berbasis Kompetensi SD*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum.
- Nana Sudjana. 2006. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nasional, K. P. (2010). *Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya Untuk Membentuk Daya Saing Dan Karakter Bangsa*. Jakarta: BPPPK Kemdiknas RI.Kebudayaan.
- Noeng Muhadjir. (2005). *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta: Raka Sarasin, h. 15.
- Riant Nugroho. (2008). *Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Dinamika Analisis.
- Rukiyati, Sutarini, N. & Priyoyuwono (2014). *Penanaman Nilai Karakter Tanggung Jawab Dan Kerja Sama Terintegrasi Dalam Perkuliahan Ilmu Pendidikan*. *Jurnal Pendidikan Karakter*.
- Salahudin, A. & Alkrienciehie, I. (2013). *Pendidikan Karakter: Pendidikan berbasis agama dan budaya bangsa*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sanjaya, Wina. 2010. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Rawamangun.
- Solichin. (2014). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sulistyorini dan Muhammad Fathurrohman. 2016. *Esensi Manajemen Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Suprananto dan Kusaeri, 2012 "Pengukuran dan Penilaian Pendidikan", Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sutapa, Mada. *Kebijakan Pendidikan dalam Persepektif Kebijakan Publik* *Jurnal Manajemen Pendidikan*. No 02/TA IV/ Oktober 2008.
- Zakaria, R. T. (2011). *Penilaian sikap*. Jakarta: Pusat Penilaian Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Nasional.